

EVALUASI KESELARASAN TINGKAT KESESUAIAN LAHAN PERMUKIMAN BERDASARKAN RTRW 2021-2041 DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024

Ridho Ilham, Hamim Zaky Hadibasyir
Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Surakarta
E-mail: ridhozurit@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Sleman dari tahun 2014 sampai 2018 penggunaan lahan bangunan di mengalami peningkatan sebesar 231,65 ha dan lahan sawah mengalami penyusutan luasan sebesar 201,69 ha. Luas panen padi pada tahun 2021 sampai 2023 mengalami penurunan sekitar 1.702 ha. Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian tidak terkendali maka akan menjadi ancaman sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam skala nasional. Keselarasan tingkat kesesuaian lahan terhadap RTRW menjadi bahan evaluasi kesesuaian lahan permukiman yang dapat mengatasi alih fungsi lahan sesuai peruntukannya. Tujuan penelitian ini untuk menentukan kesesuaian lahan permukiman di wilayah Kabupaten Sleman dan menganalisis keselarasan antara hasil kesesuaian lahan permukiman berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Sleman Tahun 2021 – 2041. Metode untuk menentukan kesesuaian lahan permukiman menggunakan *skoring* dan *overlay* parameter kesesuaian lahan: kemiringan lereng, tekstur tanah, drainase permukaan, penggunaan lahan, kerawanan banjir, dan jarak terhadap jalan utama. Untuk mengetahui keselarasan kesesuaian lahan terhadap tata ruang dengan melakukan *overlay* hasil kesesuaian lahan permukiman dengan penggunaan lahan peta RTRW Kabupaten Sleman. Hasil penelitian ini yaitu Kabupaten Sleman berdasarkan hasil menunjukkan bahwa seluas 4.931,65 ha sangat sesuai (S1), sesuai (S2) 19.247,89 ha, sesuai marginal (S3) luas 24.116,45 ha, lokasi tidak sesuai (N) 9.041,53 ha. Keselarasan terhadap RTRW terdapat kelas selaras 35.040,80 ha atau 61% didominasi oleh permukiman dan tidak selaras 22.439,92 ha atau 39% didominasi oleh kawasan tanaman pangan. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan potensi strategis sektor perumahan mempengaruhi kebutuhan penggunaan lahan permukiman.

Kata Kunci : Keselarasan, Kesesuaian Lahan, Permukiman, RTRW

Abstract

Sleman Regency from 2014 to 2018, the use of building land increased by 231.65 ha and rice fields decreased by 201.69 ha. The area of rice harvest in 2021 to 2023 decreased by around 1,702 ha. Uncontrolled conversion of agricultural land to non-agricultural land will become a social, economic, and environmental threat on a national scale. The alignment of the level of land suitability to the RTRW is a material for evaluating the suitability of residential land that can overcome the conversion of land according to its designation. The purpose of this study was to determine the suitability of residential land in the Sleman Regency area and to analyze the alignment between the results of residential land suitability based on the Regional Spatial Plan in Sleman Regency for 2021 - 2041. The method for determining residential land suitability uses scoring and overlay

of land suitability parameters: slope, soil texture, surface drainage, land use, flood vulnerability, and distance to main roads To determine the harmony of land suitability to spatial planning by overlaying the results of residential land suitability with land use on the Sleman Regency RTRW map. The results of this study are that Sleman Regency based on the results shows that an area of 4,931.65 ha is very suitable (S1), suitable (S2) 19,247.89 ha, marginally suitable (S3) area 24,116.45 ha, unsuitable location (N) 9,041.53 ha. Harmony with the RTRW, namely the harmonious class of 35,040.80 ha or 61% is dominated by settlements while the non-harmonious class has an area of 22,439.92 ha or 39% dominated by food crop areas. The increasing rate of population growth and the strategic potential of the housing sector affect the need for residential land use.

Keywords: *Harmony, Land Suitability, Settlement, RTRW*

1. PENDAHULUAN

Kesesuaian lahan merupakan tingkat kecocokan lahan untuk suatu penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan dapat dinilai berdasarkan kondisi saat ini atau setelah dilakukan perbaikan (Kadriansari dkk, 2017). Dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007 menyebutkan bahwa pemantauan dan evaluasi penggunaan lahan dilakukan dengan memeriksa dan mengawasi kesesuaian antara pelaksanaan tata ruang dengan ketentuan perundang-undangan. Evaluasi lahan merupakan pemberian nilai kepada sumber daya lahan yang bertujuan tertentu dengan menggunakan metode atau cara yang telah terbukti dan teruji. Hasil penilaian akan memberikan informasi dan panduan penggunaan lahan berdasarkan kebutuhan (Luhukay *et al.*, 2019). Evaluasi tersebut merupakan langkah penting dalam perencanaan pemanfaatan lahan dan pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan, diharapkan penggunaan lahan yang dipilih akan memberikan manfaat maksimal sekaligus meminimalkan dampak negatif ekologi dan sosial.

Meningkatnya pertumbuhan penduduk di perkotaan diikuti dengan bertambahnya fasilitas yang diperlukan seperti fasilitas umum, perumahan, industri, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang mengakibatkan pembangunan bergerak ke pinggiran kota. Pembangunan di suatu wilayah harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dibuat oleh pemerintah. Kegiatan penataan ruang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan rencana, dan pengendalian pelaksanaan rencana tata ruang (Muta'ali, 2013). Prihatin (2015) menyampaikan, tidak terkendalinya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian, maka akan menjadi masalah sosial, ekonomi dan lingkungan dalam skala nasional.

Menurut data Badan Pusat Statistik (2024), Kabupaten Sleman pada tahun 2020 memiliki jumlah penduduk 1.125.804 jiwa dan pada tahun 2023 memiliki jumlah penduduk 1.157.292 jiwa. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Sleman mengalami peningkatan selama

tiga tahun terakhir dengan kepadatan penduduk 1.959 jiwa/km² pada tahun 2020 dan mengalami kenaikan tahun 2023 dengan kepadatan penduduk 2.013 jiwa/km². Tingginya kebutuhan penduduk berdampak pada peningkatan kebutuhan lahan untuk permukiman, yang kemudian dampak tersebut mengalami alih fungsi lahan. Tercatat dari tahun 2014 sampai 2018 penggunaan lahan bangunan di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan sebesar 231,65 ha dan lahan sawah mengalami penyusutan luasan sebesar 201,69 ha (BPS Kabupaten Sleman, 2018). Banyaknya daya tarik yang dimiliki Kabupaten Sleman sebagai pusat pendidikan, tujuan wisata, tempat tinggal, dan tempat perkembangan budaya mengakibatkan urbanisasi menjadi meningkat. Tercatat pada tahun 2021 migrasi yang datang sebanyak 13.303 jiwa dan yang keluar sebanyak 9.677 jiwa (BPS Kabupaten Sleman, 2021)

UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman menyebutkan bahwa rumah adalah suatu bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana dalam membina keluarga, serta harta bagi pemiliknya. Ketidakseimbangan antara kebutuhan lahan dengan ketersediaan lahan menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan menjadi lahan permukiman. Salah satu upaya untuk menjaga fungsi lahan tersebut dengan melakukan analisa kesesuaian lahan. Dalam perencanaan lahan yang memadai dalam konteks tata ruang wilayah maupun pemanfaatan lahan tertentu harus didasari pada analisa sumber daya lahan (Radnawati & Nugroho, 2020). Pemanfaatan SIG dalam perkembangannya dapat digunakan dalam menganalisis kesesuaian lahan untuk pengembangan jenis penggunaan lahan pada wilayah dengan karakteristik yang berbeda beda. Hal tersebut melatarbelakangi penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian lahan permukiman dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis di wilayah Kabupaten Sleman dan menganalisis keselarasan antara hasil kesesuaian lahan permukiman berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Sleman Tahun 2021 – 2041.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif didukung dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) kemudian melakukan skoring dan *overlay* untuk melihat kesesuaian lahan permukiman di Kabupaten Sleman. Tahapan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan jenis data diantaranya data primer berupa survey lapangan dan data sekunder berupa parameter kemiringan lereng (Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman), tekstur tanah (Pusat Penelitian Tanah), drainase permukaan (Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Sleman), penggunaan lahan

(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman), kerawanan banjir (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), jarak terhadap jalan utama (Badan Informasi Geospasial).

Teknik pengambilan sampel untuk kesesuaian lahan permukiman pada penelitian ini adalah *stratified random sampling* merupakan metode pengambilan sampel dengan melakukan pembagian populasi menjadi beberapa kelompok, selanjutnya dari setiap kelompok mengambil sampel secara acak. Parameter yang telah ditentukan dilakukan *overlay* dan kemudian dilakukan pengharkatan berjenjang tertimbang sehingga diperoleh skor akhir kesesuaian lahan permukiman. Adapun besar faktor penimbang dari setiap parameter disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Faktor Penimbang Parameter Untuk Lokasi Pemukiman

No.	Parameter	Penimbang Parameter Terhadap Permukiman
1.	Kemiringan Lereng	2
2.	Drainase Permukaan	2
3.	Penggunaan Lahan	3
4.	Tekstur Tanah	1
5.	Kerawanan Banjir	1
6.	Jarak Terhadap Jalan Utama	3

Sumber: Suharyadi (1996); Plamino, (2022)

Formula Perhitungan:

$$\text{Harkat Total} = (Hkl \times fkl) + (Hd \times fd) + (Hpl \times fpl) + (Ht \times ft) + (Hb \times fb) + (Hj \times fj)$$

$$\text{Harkat Total} = (Hkl \times 3) + (Hd \times 2) + (Hpl \times 2) + (Ht \times 1) + (Hb \times 1) + (Hj \times 3)$$

Keterangan :

Hkl	: Pengaruh kemiringan lereng	Ht	: Bobot tekstur tanah
Hd	: Bobot kemiringan lereng	Ft	: Pengaruh terkstur tanah
Fkl	: Bobot drainase	Hb	: Bobot kerawanan banjir
Fd	: Pengaruh drainase	Fb	: Pengaruh kerawanan banjir
Hpl	: Bobot penggunaan lahan	Hj	: Bobot jalan utama
Fpl	: Pengaruh penggunaan lahan	Fj	: Pengaruh jalan utama

Tabel 2. Kriteria Kesesuaian Lahan Untuk Permukiman

Parameter	Kelas	Identifikasi	Harkat
Lereng (%)	0 – 8	Datar	5
	8 – 15	Landai	4
	15 – 25	Agak Curam	3
	25 – 45	Curam	2
	> 45	Sangat Curam	1

Drainase	Pengatusan Sangat Cepat	Sangat Baik	5
	Pengatusan Cepat	Baik	4
	Pengatusan Sedang	Sedang	3
	Pengatusan Lambat	Jelek	2
	Tergenang	Sangat Jelek	1
Penggunaan lahan	1. Semak, lahan kosong, dan lahan tidak dimanfaatkan	Sangat baik	5
	2. Perkarangan, kebun campuran, dan sejenisnya	Baik	4
	3. Pertanian lahan kering berupa tegalan, perkebunan, dan sebagainya	Sedang	3
	4. Lahan pertanian berupasawah non irigasi dan sejenisnya	Jelek	2
	5. Sawah irigasi, permukiman, industri, kawasan militer, situs purbakala, pertambangan. Fasilitas pendidikan dan jasa	Sangat jelek	1
Tekstur tanah	Kasar	Sangat Baik	5
	Agak Kasar	Baik	4
	Sedang	Sedang	3
	Agak Halus	Jelek	2
	Halus	Sangat Jelek	1
Kerawanan banjir	Tidak Rawan	Sangat Baik	5
	Agak Rawan	Baik	4
	Sedang	Sedang	3
	Rawan	Jelek	2
	Sangat Rawan	Sangat Jelek	1
Jarak dengan jalan utama (m)	0-500	Sangat Baik	5
	500-1.000	Baik	4
	1.000-1.500	Sedang	3
	1.500-2.000	Jelek	2
	>2.000	Sangat Jelek	1

Sumber : Hasnani (2013); Plamino (2022)

Perhitungan Interval Kelas Menggunakan Formula Struges

$$x = \frac{\text{skor tertinggi} - \text{skor terendah}}{\text{Jumlah Kelas}}$$

Dengan menggunakan formula perhitungan harkat total tersebut didapatkan nilai tertinggi dan terendah yaitu 60 dan 20, selanjutnya akan diklasifikasikan menjadi 4 kelas lahan permukiman tersebut seperti Tabel 3 dibawah ini;

$$\text{Kelas Interval} = \frac{60 - 20}{5} = 9.6$$

Tabel 3. Kelas Kesesuaian Lahan Untuk Permukiman

No	Klasifikasi	Kelas Interval	Keterangan
1	Sangat Sesuai (S1)	>50,7	Sangat sesuai untuk permukiman
2	Sesuai (S2)	41,1 – 50,7	Cukup sesuai untuk zona permukiman
3	Sesuai Marginal (S3)	31,4 – 41,0	Terdapat faktor pembatas untuk permukiman
4	Tidak Sesuai (N)	21,7 – 31,3	Tidak sesuai untuk permukiman
5	Tidak Sesuai Permanen (N2)	12,0 – 21,6	Permanen tidak sesuai untuk permukiman

Sumber : Pengolahan Data, 2024

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kesesuaian Lahan Permukiman di Kabupaten Sleman

Kesesuaian lahan permukiman merupakan tingkat kesesuaian atau kecocokan suatu lahan untuk digunakan sebagai tempat bermukim/tinggal. Kesesuaian lahan permukiman di Kabupaten Sleman diperoleh dari hasil overlay dengan menggunakan beberapa parameter diantaranya kemiringan lereng, jenis tanah, drainase, penggunaan lahan, aksesibilitas dan kerawanan banjir. Berdasarkan analisis diperoleh hasil kesesuaian lahan permukiman dengan kelas sangat sesuai, sesuai, sesuai marginal, dan tidak sesuai.

Tabel 4. Luas Berdasarkan Kelas Kesesuaian Lahan Permukiman di Kabupaten Sleman

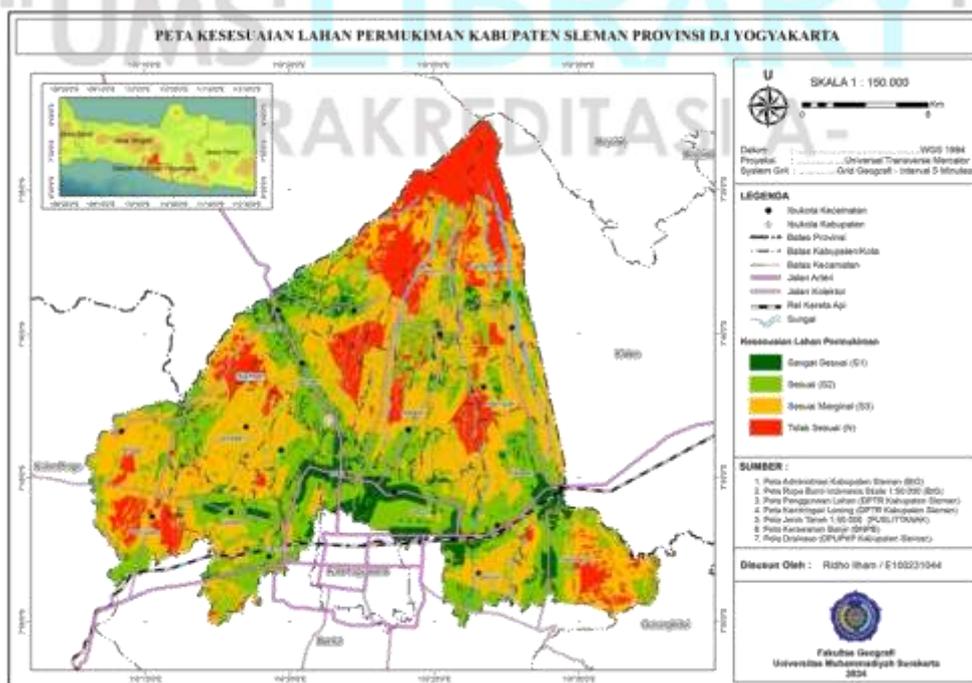
No	Kesesuain Lahan	Kelas Interval	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai (S1)	>50,7	4931,65	8,6
2	Sesuai (S2)	41,1 – 50,7	19247,89	33,7
3	Sesuai Marginal (S3)	31,4 – 41,0	24116,45	42
4	Tidak Sesuai (N)	21,7 – 31,3	9041,53	15,7
5	Tidak Sesuai Permanen (N2)	12 – 21,6	0	0

Sumber : Pengolahan Data, 2024

Berdasarkan Tabel 9 hasil yang didapat kelas kesesuaian lahan pada kelas Sangat Sesuai S1 seluas 4.931,65 ha (8,6%), Sesuai S2 seluas 19.247,89 ha (33,7%), Sesuai Marginal S3 merupakan kelas yang paling luas dengan luasan 24.116,45 ha (42%) dan luasan untuk kelas tidak sesuai sekitar 9.041,53 ha (15%). Berdasarkan tabel tersebut kecamatan yang didominasi lahan sangat sesuai untuk bermukim yaitu Kecamatan Mlati, Depok, Kalasan, Tampilan. Kecamatan Depok merupakan daerah paling luas bagi lahan yang sangat sesuai untuk permukiman dengan luas 1.156 ha, sedangkan Kecamatan Moyudan daerah yang

sedikit untuk kelas lahan sangat sesuai dengan luas 38 ha. Untuk kelas lahan yang sesuai yaitu; Kecamatan Gamping, Depok, Kalasan. Sedangkan kelas lahan sesuai marginal adalah; Kecamatan Seyangan, Prambanan, Ngemplak dan Cengkringan. Sementara itu kelas lahan yang tidak sesuai untuk mendirikan permukiman diantaranya Kecamatan Moyudan, Prambanan, Turi, Pakem, Cangkringan. Persebaran kesesuaian lahan permukiman yang terdapat di Kabupaten Sleman ditampilkan pada Gambar 4.1 dengan detail berupa gambar peta kesesuaian lahan permukiman di Kabupaten Sleman.

Kesesuaian lahan untuk permukiman pada kelas kesesuaian lahan yang sesuai umumnya bera di kemiringan lereng yang datar dimana tingkat kemiringan lereng ini sangat layak untuk mendirikan bangunan, selain itu tekstur tanah kasar dan di dukung oleh drainase yang sangat baik. Kondisi lokasi yang sangat sesuai untuk lokasi permukiman juga memiliki tingkat kerawanan bencana yang rendah dengan letak lokasi yang berada sangat dekat dengan jalan utama, umumnya kesesuaian lokasi ini berada di penggunaan lahan berupa semak, lahan kosong dan lahan tidak dimanfaatkan sehingga sangat sesuai dijadikan sebagai lahan permukiman. Sedangkan untuk lahan yang tidak sesuai memiliki faktor pembatas yang sangat berat dan sulit untuk diatasi jika diperuntukan untuk kawasan permukiman. Salah satu faktor pembatas pada lahan ini berupa jarak terhadap jalan utama berada pada jarak lebih dari 2.000 m yang merupakan aksesibilitas yang jauh untuk mendirikan permukiman. Selain itu faktor pembatas untuk penggunaan lahan pada lokasi ini berupa sawah irigasi, bangunan permukiman, fasilitas sarana prasarana, dan bangunan lainnya.



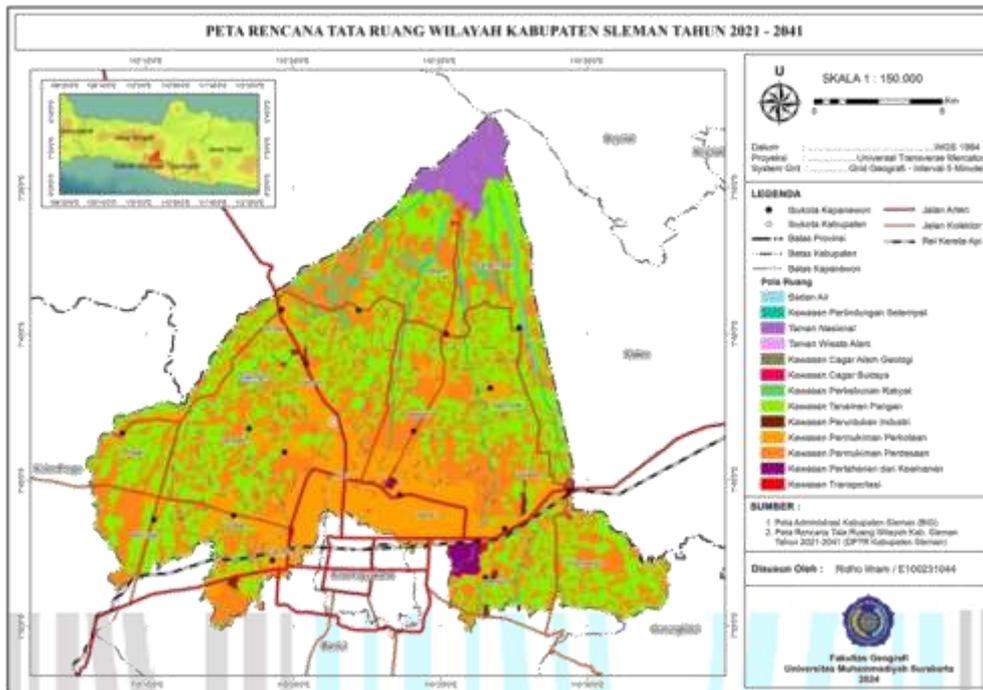
Gambar 1. Peta Kesesuaian Lahan Permukiman di Kabupaten Sleman Tahun 2024

Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan potensi strategis sektor permukiman mempengaruhi kebutuhan penggunaan lahan untuk mendirikan tempat tinggal/bermukim (Rindarjono, 2012). Perlu diketahui jika ingin mengembangkan kawasan permukiman di Kabupaten Sleman, karena faktor alih fungsi lahan yang berbeda, maka terdapat kebijakan untuk lahan sawah yang dilindungi dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2020 tentang prosedur melakukan verifikasi data lahan sawah, penetapan sawah yang dilindungi, dan memberikan rekomendasi dalam perubahan pemanfaatan lahan sawah yang dilindungi oleh pemerintah. Apabila kawasan tersebut terletak pada kawasan persawahan yang dilindungi, maka fungsi pemanfaatan lahan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Masganti *et al* (2020) Banyaknya perubahan lahan dalam pembangunan permukiman akan berdampak negatif apabila pengelolaan penggunaan lahan tersebut tidak terkendali sehingga berdampak pada menurunnya produktivitas dalam sektor pertanian.

3.2 Keselarasan Kesesuaian Lahan Permukiman Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Dasar dalam menyusun rencana tata ruang dijelaskan di dalam Undang-Undang No.26 tahun 2007 bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mengenai peraturan zonasi atau blok. Peta perencanaan tata ruang dibuat oleh pemerintah daerah berdasarkan kondisi wilayahnya baik kondisi fisik maupun ekonomi penduduknya dengan tujuan untuk mengurangi permasalahan penggunaan lahan wilayah demi terwujudnya ruang masa depan yang baik dan tertata pada masa yang akan datang. RTRW merupakan rencana dan strategi untuk target yang harus dicapai pada setiap 20 tahun kedepan.

Pembangunan di suatu wilayah harus sesuai dengan RTRW yang dibuat oleh pemerintah. Kegiatan penataan ruang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan rencana, dan pengendalian pelaksanaan rencana tata ruang (Muta'ali, 2013). Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman memiliki pemanfaatan lahan yang beragam yang tersebar di seluruh Kabupaten Sleman (Gambar 2). Luasan yang mendominasi pada perencanaan tata ruang Kabupaten Sleman yaitu kawasan permukiman perdesaan, kawasan permukiman perkotaan, dan kawasan tanaman pangan.



Gambar 2. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman 2021-2041

Peta keselarasan kesesuaian lahan permukiman dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diperoleh dari hasil *overlay* antara peta kesesuaian lahan permukiman Kabupaten Sleman dengan peta Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2021-2041 Kabupaten sleman. Proses *overlay* tersebut menghasilkan 2 klasifikasi yaitu selaras dan tidak selaras.

Tabel 5. Luas Keselarasan Kesesuaian Lhan Permukiman Dengan RTRW Kabupaten Sleman

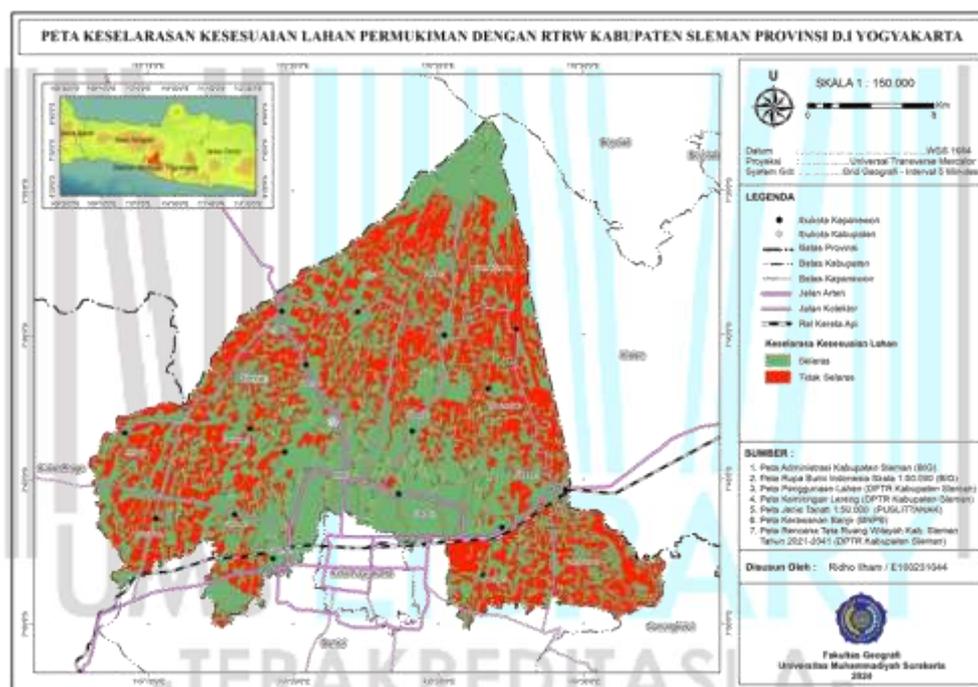
Keselarasn Kesesuaian Lahan Permukiman Dengan RTRW	Luas (Ha)	Persentase (%)
Selaras Dengan RTRW	35.040,80	61
Tidak Selaras Dengan RTRW	22.296,73	39
Jumlah	57.337,53	100

Sumber : Pengolahan Data, 2024

Berdasarkan hasil *overlay* antara peta kesesuaian lahan permukiman dengan peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman dapat dilihat hasil keselarasan antara dua peta tersebut yang di sajikan pada Tabel 10. Keselarasan kesesuaian lahan permukiman yang selaras merupakan kelas kesesuaian lahan permukiman yang pemanfaatannya selaras dengan yang telah direncanakan pada tata ruang. Lahan yang selaras contohnya pada tata ruang yang direncanakan untuk kawasan permukiman, sedangkan pada kesesuaian lahan permukiman berupa kelas sangat sesuai (S1) maka dikatakan selaras dengan rencana tata ruang untuk pengembangan permukiman. Lahan yang selaras dengan pola ruang memiliki

luasan 35.040,80 hektar atau 61% dari luasan Kabupaten Sleman. Pemanfaatan lahan yang selaras didominasi oleh kawasan permukiman perdesaan, kawasan permukiman perkotaan.

Keselarasan kesesuaian lahan yang tidak selaras merupakan kelas kesesuaian lahan permukiman yang pemanfaatannya tidak selaras dengan yang telah direncanakan pada tata ruang. Lahan yang tidak selaras contohnya, pada tata ruang yang direncanakan untuk kawasan permukiman, sedangkan pada kelas kesesuaian lahan permukiman berupa kelas tidak sesuai (N) maka dikatakan tidak selaras dengan rencana tata ruang untuk permukiman. Lahan yang tidak selaras dengan pola ruang memiliki luasan 22.439,92 hektar atau 39% dari luasan Kabupaten Sleman. Pemanfaatan lahan yang tidak selaras didominasi oleh kawasan tanaman pangan berupa pertanian sawah irigasi.



Gambar 3. Peta Keselaraan Kesesuaian Lahan Permukiman Terhadap RTRW Kabupaten Sleman

Tentunya harapan tersebut harus diwujudkan dengan baik, sehingga memerlukan koordinasi yang berkesinambungan antara pemerintah daerah, swasta, akademisi, dan masyarakat setempat. Terkadang perubahan penggunaan lahan pada suatu kawasan tidak selaras dengan tata ruang yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh pemerintah setempat, seperti perencanaan pola ruang di dalam RTRW dan RDTR (Alwan, 2020). Alih fungsi lahan tersebut terjadi karena semakin meningkatnya kebutuhan penduduk untuk keperluan dalam pemanfaatan lahan mengakibatkan lahan tersebut mengalami perubahan (Kusumaningrat *et al*, 2017). Kesadaran masyarakat dibutuhkan dalam mematuhi peraturan tata ruang yang

berlaku agar menghindari konflik penggunaan lahan guna menciptakan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan sangatlah penting

Kesesuaian lahan permukiman yang sudah selaras dengan RTRW dapat dipertahankan untuk pengembangan lahan permukiman di Kabupaten Sleman. Lahan permukiman yang tidak selaras dengan tata ruang dapat dikaji lebih lanjut lagi. Masyarakat yang mengabaikan peraturan perencanaan tata ruang dapat dikenakan denda berdasarkan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sanksi yang dijatuhkan tergantung pada besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan, dapat berupa denda ataupun tindakan hukum lainnya. Evaluasi ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut dalam mengembangkan suatu lahan permukiman agar terhindar dari kerusakan lingkungan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kabupaten Sleman berdasarkan hasil kesesuaian lahan untuk permukiman dengan metode *overlay* menunjukkan bahwa seluas 4.931,65 ha atau 8,6% lahan yang sangat sesuai (S1), untuk lokasi sesuai (S2) dengan luas 19.247,89 ha atau setara dengan 33,57% , untuk lokasi sesuai marginal (S3) yang merupakan zona paling luas dengan faktor pembatas yang berat memiliki luas 24.116,45 ha atau dengan persentase 42%, untuk lokasi yang tidak sesuai (N) dengan luasan 9.041,53 ha atau setara dengan 15,7% dari luas Kabupaten Sleman.

Keselarsan kesesuaian lahan permukiman terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman terdapat dua kelas keselarsan yaitu kelas selaras dengan pola ruang memiliki luas daerah 35.040,80 hektar atau 61% yang didominasi oleh kawasan permukiman perdesaan, kawasan permukiman perkotaan. Lahan yang tidak selaras dengan pola ruang memiliki luasan 22.439,92 hektar atau 39% dari luasan Kabupaten Sleman didominasi oleh kawasan tanaman pangan.

4.2 Saran

Perlunya pengembangan terhadap lahan permukiman di Kabupaten Sleman sesuai arahan dan kebijakan tata ruang, dalam hal ini dapat menyeimbangi antara kebutuhan lahan permukiman yang meningkat dengan ketersediaan lahan yang ada di Kabupaten Sleman. Selain itu, harapan tersebut harus terealisasi dengan baik agar tidak menimbulkan dampak kedepan yang dapat merugikan penggunaan lahan tersebut.

Dalam penelitian kesesuaian lahan permukiman disarankan untuk menggunakan parameter kesesuaian lahan permukiman yang lebih banyak lagi seperti parameter gerakan tanah dan bencana alam lainnya agar menghasilkan data yang lebih valid dan terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwan, Barkey, A. R., & Syafri. (2020). Perubahan Penggunaan Lahan dan Keselarasan Rencana Pola Ruang di Kota Kendari. *URSJ* 3(1), 01-05
- Badan Pusat Statistik. (2018). Kabupaten Sleman dalam Angka Tahun 2018. Badan Pusat Statistik. Kabupaten Sleman.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Kabupaten Sleman dalam Angka Tahun 2024. Badan Pusat Statistik. Kabupaten Sleman.
- Hasnani. (2013). Evaluasi Kesesuaian Lahan Permukiman Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta Dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis dan Penginderaan Jauh. (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia.
- Kusumaningrat, M. D., Subiyanto, S., & Yuwono, D. B. (2017). Analisis Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2009 dan 2017(Studi : Kabupaten Boyolali). *Jurnal Geodesi*, 6(4), 443-452
- Luhukay, M.R., Sela, R. L., & Franklin, P.J. (2019). Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Permukiman Berbasis (SIG) Sistem Informasi Geografi Di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *Jurnal Spasial*, 6(2), 271-281.
- Plamino, R. (2022). Pemanfaatan Penginderaan Jauh Dan SIG Untuk Analisis Kesesuaian Lahan Permukiman Di Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Tahun 2020. (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Ratnawati, H., & Djojomartono, P.N. (2020). Analisis Kesesuaian Lahan Permukiman di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul menggunakan Pendekatan Analytical Hierarchy Process. *Journal of Geospatial Information Science and Engineering*, 3(2), 123 – 132.
- Rindarjono. (2012). Kajian Permukiman Kumuh dalam Perspektif Spasial. Yogyakarta: Media Perkasa.
- Taufikurrahman. (2017). Analisis Kesesuaian Lahan Permukiman Kawasan Sungai Siak Di Kota Pekanbaru. (Skripsi). Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Undang-Undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jakarta: DPR RI.
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Jakarta: DPR RI.